

Pemkab Lebak Anggarkan Rehab RTLH Rp4,5 Miliar

RANGKASBITUNG (IM) - Pemkab Lebak terus meminimalisir jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP). Tahun 2021, Pemkab Lebak mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,5 miliar untuk melakukan perbaikan atau rehab 300 unit RTLH.

"Untuk tahun 2021 dialokasikan dari APBD murni sebanyak 300 unit dari semula direncanakan seribu rumah. Sementara dari DAK belum ada kepastian jumlahnya, masih menunggu informasi dari kementerian," ungkap Kepala DPKPP Kabupaten Lebak, Wawan Hermawan, kemarin. Menurutnya, alokasi anggaran masing-masing RTLH yang berasal dari APBD senilai Rp15 juta. "Sementara yang berasal dari DAK sebesar Rp17,5 juta per unit" katanya.

Wawan mengklaim, di tahun ini, instansinya berhasil menyelesaikan pembangunan sebanyak 329 RTLH yang berasal dari DAK Infrastruktur Perumahan (IP).

"Secara keseluruhan Alhamdulillah program bantuan bedah rumah tahun ini sebanyak 329 unit sudah selesai,"

ujarnya. Wawan mengaku, keberhasilan itu diawali dengan proses pendataan secara menyeluruh kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tepat sasaran.

Kata dia, kendra anggaran terbatas, tetapi program bedah rumah bagi RTLH setiap tahunnya selalu meningkat. "Saat ini RTLH di Lebak mencapai 45.400 unit lagi," katanya.

Wawan mengatakan, Bupati Iti Octavia Jayabaya memiliki perhatian besar dalam program pengentasan RTLH di Kabupaten Lebak. Oleh karena, Bupati memiliki program Lebak sejahtera yang berkaitan langsung dengan ketersediaan rumah layak bagi masyarakat di 28 kecamatan.

"Tapi, karena pandemi Covid-19, tahun ini untuk alokasi seribu RTLH ditunda," katanya.

Wawan mengaku, pengentasan RTLH membutuhkan peran serta dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan pihak swasta. "Pemerintah akan bekerja langsung dengan ketersediaan pembangunan RTLH. Kami enggak ingin, ada warga yang tidur di rumah yang nyaris ambruk dan kotor," katanya. ● **pra**

87% RS DI KOTA TANGERANG PENUH

Wali Kota: Twin Plaza Slipi Siap Menampung

TANGERANG (IM) (17/12).

Warga yang akan menjalani isolasi mandiri karena menderita Covid-19 di Kota Tangerang akan dikirim ke Jakarta. Pasalnya, ketersediaan rumah sakit atau Bed Occupancy Ratio (BOR) di Kota Tangerang sudah mencapai 87 persen.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wisnansyah mengatakan, saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan rumah sakit untuk non Covid-19 maupun yang terinfeksi Covid-19.

Menurutnya, kapasitas bed di rumah sakit Tangerang terus diupayakan untuk ditambah agar bisa mencukupi kebutuhan pasien.

"Untuk itu masyarakat diharapkan bisa disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Kita masih di tengah pandemi jadi harus tetap waspada," ujar Arief, Kamis

Arief juga mengimbau kepada masyarakat Kota Tangerang apabila ada keluhan sakit atau ada gejala, segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan untuk segera diidentifikasi.

"Jangan sepelekan kalau sedang batuk pilek. Segera periksakan diri, karena bisa membahayakan anggota keluarga yang lain, karena saat ini masih banyak terjadi penularan Covid-19 pada kluster keluarga," jelasnya.

Saat ini Pemerintah Kota Tangerang, ujar Wali Kota, mendapatkan bantuan tempat untuk isolasi mandiri di Twin Plaza Hotel Slipi, Jakarta.

"Jadi kalau di Kota Tangerang penuh kita kirim ke sana, kasusnya sih sudah turun.

Mudah-mudahan bisa terus turun jadi masih bisa kita tangani di Kota Tangerang," pungkas Arief. ● **pp**



PRODUK OLAHAN DAUN KELOR

Umi Sriwahyuni mengemas daun kelor kering di Lingkungan Balongkrai, Kelurahan Pulorejo, Kota Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (17/12). Produk olahan daun kelor yang dipercaya meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah penyebaran COVID-19 tersebut dijual mulai Rp125 ribu per kg untuk bubuk kelor, daun kelor kering Rp100 ribu per 100 kg serta teh daun kelor Rp130 ribu.

Benyamin-Pilar Saga Resmi Menangi Pilkada Tangsel

TANGSEL (IM) - Pasangan calon nomor urut tiga pada Pilkada Tangerang Selatan 2020, Benyamin-Davnie-Pilar Saga Ichsan, memenangi pilkada, berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel.

KPU Tangsel menetapkan hasil resmi pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada 2020 dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota yang diselenggarakan di Hotel Grand Zuri, Tangerang Selatan, Kamis (17/12).

"Kami mulai rapat pleno Rabu (16/12) dan hari ini kami sudah menetapkan perolehan hasil dari rapat terbuka rekapitulasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan 2020," kata Plt Ketua KPU Tangsel M Taufik MZ, Kamis.

Dari total 594.711 suara dari 2.963 TPS di Tangsel yang telah direkapitulasi, pasangan Benyamin-Pilar mendapat perolehan tertinggi

dengan 235.734 suara. Benyamin-Pilar mengalahkan dua rivalnya. Pasangan calon nomor urut satu Muhammad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Sara) memperoleh 205.309 suara. Sementara itu, pasangan calon nomor urut dua Siti Nur Azizah-Ruhamben mendapatkan 134.682 suara.

Tingkat partisipasi pemilu turun jadi masih bisa kita tangani di Kota Tangerang," pungkas Arief. ● **pp**



BANGUNAN PERTUNJUKAN KUNO UNTUK BALAI DESA

Seorang perangkat desa melintas di samping bangunan kuno yang masih dipertahankan di Balai Desa Pondok, Karangom, Klaten, Jawa Tengah, Kamis (17/12). Bangunan yang memiliki bentuk era Belanda tersebut dibangun pada tahun 1958 yang digunakan sebagai gedung pertunjukan ketoprak, hingga kini masih dipertahankan dan digunakan sebagai Kantor Desa Pondok.

Pemkot Tangerang Bangun Kolam Olakan untuk Cegah Banjir

Telah dilakukan beberapa cara untuk mencegah banjir dan genangan yang mungkin terjadi di tengah musim hujan ini. Salah satunya adalah pembuatan kolam olakan. Pembangunan kolam dilakukan antara lain di sekitar Jembatan Alamanda, Kecamatan Periuk, Tangerang.

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten, meng-

dalkan kolam olakan yang sedang dibangun untuk mencegah banjir.

Pemkot Tangerang Raih Apresiasi KPK Terkait Pencegahan Korupsi

Tangerang (IM) - Pemerintah Kota Tangerang, Banten, meraih apresiasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas capaian Pemerintah Daerah dalam membangun tata kelola pencegahan korupsi tahun 2020.

"Ini jadi tambahan semangat bagi Pemkot Tangerang dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang anti korupsi," kata Wali Kota Tangerang, Arief R Wisnansyah di Tangerang, Kamis (17/12).

Wali Kota Arief menuturkan apresiasi tersebut diterima langsung olehnya dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kemarin.

Wali Kota menambahkan

Pemkot Tangerang akan selalu bersinergi dengan KPK RI terlebih dalam mendukung jalannya roda pemerintahan di Kota Tangerang.

"Bukan hanya KPK, tapi juga lembaga negara lainnya untuk proses pendampingan," katanya menegaskan.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firlu Bahuri dalam keterangan yang diterima mengatakan peringatan Hakordia kali ini mengulas perkembangan seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kami ingin memperkuat komitmen dan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dengan memperluas keterlibatan masyarakat secara aktif dalam sosialisasi nilai-nilai antikorupsi," ujarnya. ● **pp**

Kelebihan Kapasitas Diduga Jadi Penyebab 103 Napi Rutan Positif Covid

TANGERANG (IM) - Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Pandu Riono, mempertanyakan penerapan protokol kesehatan (Prokes) di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Tangerang. Diketahui, ratusan narapidana dan puluhan petugas rutin terkonfirmasi positif Covid-19.

Sebelumnya, 103 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan 42 petugas Rutan Klas I Tangerang, terkonfirmasi positif Covid-19. Hal itu, baru diketahui setelah pihak Rutan melakukan swab tes terhadap 1.500 WBP dan petugas Rutan pada Jumat (11/12) lalu.

"Sudah sering terjadi, kalau melihat laporan Dinas Kesehatan, kluster Rutan dan Lapas sudah sering. Karena kondisinya tidak memungkinkan mereka menjaga jarak dan sebagainya," jelas Pandu Riono dikonfirmasi Kamis (17/12).

Dia mengakui, kelebihan kapasitas Rutan dan Lapas yang sudah sangat berlebihan dari kapasitas ideal menjadi persoalan sulitnya menerapkan protokol kesehatan di lembaga pemasyarakatan tersebut.

"Susah, itu problem paling susah. Karena kondisi Lapas kita sangat krodid. Kalau mau taruh di Pulau Nusakambangan, itu juga susah," ungkapnya.

Namun begitu, Pandu mempertanyakan Standar Operasional Prosedur (SOP), dalam penerapan Prokes di

Rutan dan Lapas.

Menurut dia, dengan menjalankan SOP itu, seharusnya penyebaran penyakit menular akibat virus ini tidak cepat meluas bagi petugas dan WBP yang ada.

"Mereka punya SOP, protokol yang harus dipatuhi dalam Rutan.

Mungkin itu tidak pernah dipatuhi atau monitoring dan evaluasi terhadap itu dipastikan itu berjalan," ucapnya.

Kepala Bagian Humas dan Publikasi Ditjen Pas, Rika Aprianti menyebutkan, atas kejadian itu, kunjungan langsung di Rutan Tangerang distop. Namun WBP tetap diberikan hak untuk bisa bertemu keluarga secara online.

"Adanya kunjungan yang dibuka di Rutan Tangerang, tetap dengan protokol kesehatan tidak bertemu langsung juga. Dengan video call dan berhadapan-hadapan by phone jadi tidak bertemu langsung," jelas dia.

Sementara, 42 petugas Rutan yang positif Covid-19 saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah dan tempat karantina khusus yang disediakan Pemkab Tangerang.

Sedangkan 103 WBP saat ini menjalani karantina mandiri di blok isolasi yang ada di dalam Rutan.

"Blok khusus (WBP) ditempatkan. Dari awal Covid-19 di setiap wilayah disiapkan blok khusus untuk isolasi. Sesuai waktunya mereka di-swab lagi," jelas Rika Aprianti. ● **pp**

Kasubag Humas Pemkot Tangerang, Buceu Gartina mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapa cara untuk mencegah banjir dan genangan yang mungkin terjadi di tengah musim hujan ini.

Salah satunya adalah pembuatan kolam olakan.

Pembangunan kolam dilakukan antara lain di sekitar Jembatan Alamanda, Kecamatan Periuk, Tangerang.

"Di lokasi jembatan itu kan sering tergenang.

Nah, dibuat kolam di bawah untuk serap air ke bawah. Lalu, ditambah pompa agar air di atas bisa dibuang langsung di lokasi itu," ujarnya, Kamis (17/12).

Akhir pekan lalu, Wali

Kota Tangerang, Arief R Wisnansyah meninjau lokasi kolam olakan tersebut.

Arief mengemukakan, sistem drainase satu titik yang dibuat untuk mengurangi debit air di wilayah tersebut.

"Beberapa saluran air akan dikoneksikan sehingga pengurangan debit air pada genangan di Jembatan Alamanda bisa lebih cepat lagi surutnya," kata dia.

Ada tiga kolam olakan di sekitar jembatan tersebut. Sedangkan tiap kolam beragam, mulai dari satu setengah hingga tiga meter.

Di tiap kolam olakan dilengkapi pompa submersible berkapasitas 67 hingga 300 liter per detik.

"Air akan otomatis men-

galir ke kolam tersebut bila ada genangan.

Dan secara otomatis aliran air akan dipompa ke tandon terdekat," urainya.

Ia mengimbau agar seluruh warga Tangerang Kota waspada terhadap cuaca ekstrem saat ini.

Ia juga mengingatkan warga untuk menjaga kebersihan lingkungan.

"Tidak membuang sampah sembarangan serta menjaga kesehatan juga," ujar dia.

Kawasan Jembatan Alamanda dan sekitarnya kerap dilanda banjir.

Banjir terakhir di daerah itu terjadi awal dan akhir Februari lalu.

Ketinggian banjir saat itu mencapai 65 sentimeter. ● **pp**

Pilkada Dinilai Cacat Hukum, Thoni-Imat Siap Gugat ke MK

Pandeglang (IM) - Pasangan Thoni Mukson-Miftahul Tamamy tengah mempersiapkan gugatan mulai ke Mahkamah Konstitusi, PN Pandeglang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sampai ke Komisi ASN.

Mereka menganggap proses di Pilkada Pandeglang 2020 diduga terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Ketua Tim Kampanye, Adri Yoga Permana mengatakan, pada pleno rekapitulasi penghitungan suara Selasa (15/12) lalu, timnya mengisi form keberatan dan tidak menandatangani hasil pleno.

Ia menilai ada cacat hukum dan pelanggaran yang sistematis dan keterlibatan ASN di Pemkab Pandeglang.

"Cacat hukum karena terjadi (pelanggaran) TSM, di mana ASN terus juga diangkat pemerintahan lainnya bergerak aktif setiap hari setiap waktu.

Tim 02 hadapi bukan tim sukses, yang dihadapi aparat pemerintah dan ASN

sampai tingkat desa," kata Andri di Pandeglang, Banten, Kamis (17/12).

Pasangan ini pun menyatakan bahwa proses Pilkada di Pandeglang cacat hukum. Langkah hukum sedang disiapkan ke beberapa lembaga.

Saat ini yang tengah berjalan, menurut Andri, adalah gugatan atas Bawaslu Pandeglang.

Mereka menganggap laporan pasangan Thoni-Imat yang selama ini dilaporkan selalu tidak diregister Bawaslu.

"Gugatan ini sudah proses dan masuk di PN Pandeglang," ujar Andri.

Dihubungi terpisah, Satria Pratama, selaku koordinator tim hukum, menerangkan bahwa gugatan atas Bawaslu akan memasuki sidang kedua pada 22 Desember.

Seluruh komisioner pengawas ini juga akan dilaporkan ke DKPP terkait etik mereka.

Karena laporan dugaan netralitas ASN yang selama ini tim anggap tidak ditanggapi dan diselesaikan oleh Bawaslu, laporan diteruskan

juga ke Komisi ASN.

"Laporan adanya pelanggaran netralitas ASN yang tak kunjung ada putusan jelas dari Bawaslu dan Gakkumdu, kita laporkan ke KASN," tutur Satria.

Untuk gugatan ke MK, timnya masih menunggu arahan dari ahli.

Yang jelas, kata dia, tidak menutup kemungkinan tim akan menggugat ke sana. "Masih mempertimbangkan dan melakukan kajian untuk gugatan ke MK," ucapnya.

Pada Jumat (18/12), ia dan tim akan mendaftarkan gugatan ke PTUN dengan objek gugatan soal pleno penetapan suara oleh KPU.

Tim katanya tidak permasalahan perolehan suara namun meminta membatalkan keputusan pleno.

"Objeknya adalah dari penetapan KPUD Pandeglang," kata Satria.

Hasil pleno penghitungan suara pasangan Irna Narulita-Tanto Arban memperoleh 389.367 suara.

Sedangkan Thoni Mukson-Miftahul Tamamy mendapat 223.220 suara. ● **pra**



WISATA WAHANA WATERBOOM DIKELOLA BUMDES

Wisatawan menikmati wahana waterboom di Kolam Renang Tirta Cj di Desa Cimenteng Jaya, Lebak, Banten, Kamis (17/12). Wisata wahana waterboom yang berdiri diatas lahan seluas 1.500 meter persegi dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat menjadi desa mandiri agar mendorong kemajuan serta pertumbuhan ekonomi baru di daerah tersebut.